



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU DEWANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 738537

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.095.000.000**

1. Tanah Seluas 721 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
2. Tanah Seluas 122 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 152 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
4. Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 196.000.000**

1. MOBIL, HYUNDAI SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, BEAT MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOBIL, HONDA CIVIC-FD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 29.975.000**

D. SURAT BERTARTAMBA **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 131.459.085

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.452.434.085

III. HUTANG

Rp. 72.547.959

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.379.886.126

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.